

**STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Oleh :**

**DIMAS RIZKI AL-FAIDZI**

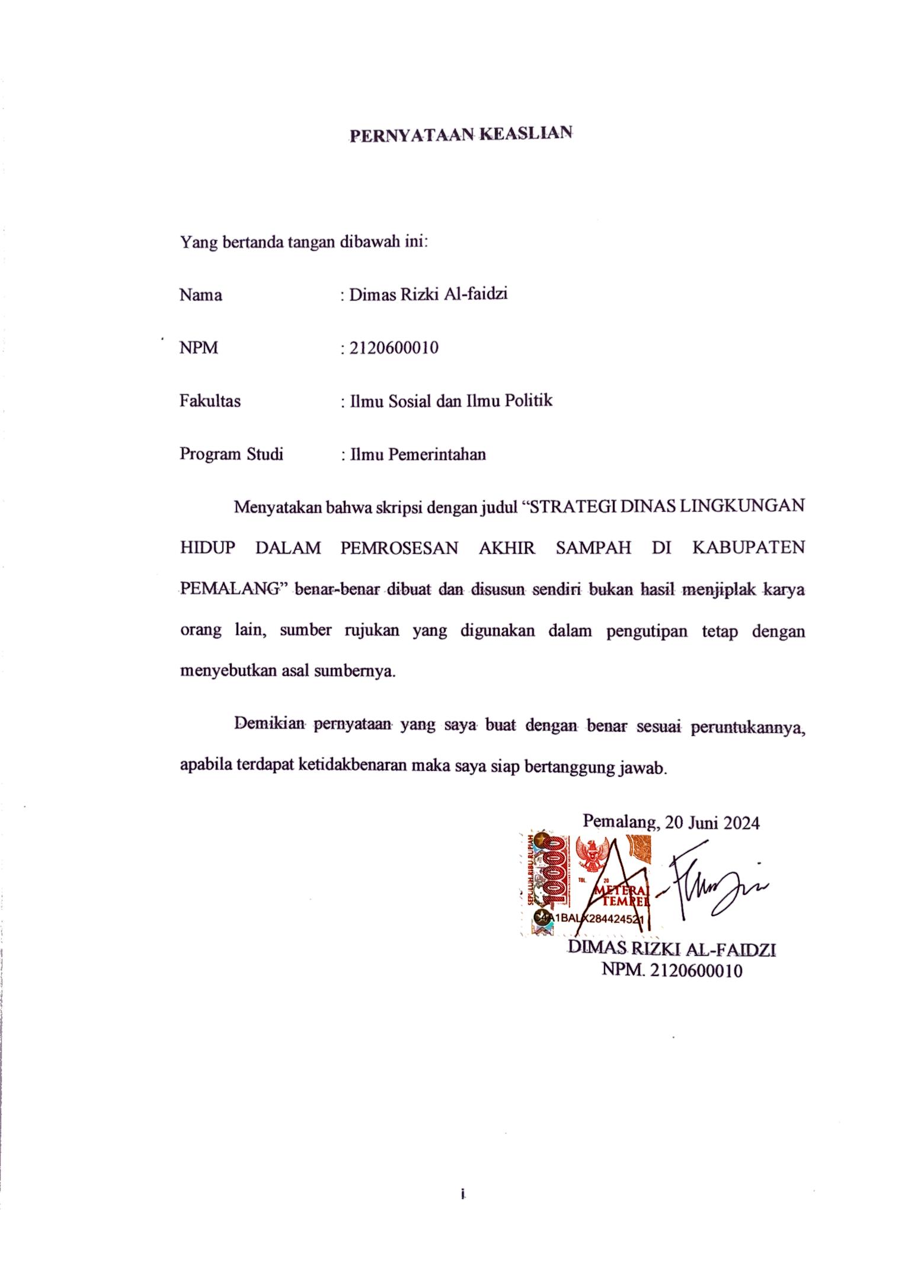
**NPM. 2120600010**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

****

****

****

# MOTTO

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.”

(**B.J. HABIBIE**)

“Kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu.”

(**R.A. KARTINI)**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Susungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(**Q.S. AL-INSYIRAH: 5-6)**

# PERSEMBAHAN

Alhamdulillah telah selesai skripsi yang saya susun dengan rasa suka dan duka dalam berjuang menyelesaikannya, tak lupa saya persembahkan penyusunan skripsi ini kepada keluarga, kepada saudara, orang-orang yang telah membimbing dan orang yang telah memberikan doa dan dukungan dengan perannya masing-masing. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibuku Astuti dan Bapakku Lukman Kusnadi yang tak lupa mendoakan dalam ibadahnya siang dan malam dengan memberi semangat dan dukungan. Terima kasih atas doa dan perjuangan yang diberikan sehingga saya mampu menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.
2. Adik perempuan, Najwa Nurul Khoirunissa yang mengingatkan saya untuk tetap semangat dan mereda rasa lelah dalam menyusun skripsi ini.
3. Saudara sepupu, Muhammad Haikal dan si kecil Muhammad Zidni yang aktif, lucu dan menghibur untuk diajak bermain hingga lupa akan rasa lelah dan bosan dalam menyusun skripsi ini.
4. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Bapak Unggul Sugi Harto, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Agus Setio Widodo, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing 2, atas tenaga, waktu, ilmu dan motivasi yang telah diberikan selama membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Terima kasih kepada teman saya yang telah membantu dengan memberi dukungan dan meluangkan waktunya.
6. Terima kasih kepada Sifatul Mahfiroh yang telah memberikan warna, dukungan, perasaan yang istimewa, dan doa terbaiknya sehingga penulis dalam menyusun skripsi ini merasakan warna dan rasa semangat yang berbeda.

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas rahmat, nikmat sehat dan nikmat iman yang telah Allah SWT berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI KABUPATEN PEMALANG”. Skripsi ini disusun sebagai satu syarat menyelesaikan studi strata 1 (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Penulisan skripsi ini tak luput dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak yang ada. Penulis menyadari tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak tidak mungkin penulisan skripsi ini akan cepat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Unggul Sugi Harto, S.IP., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Akhmad Habibullah, M.IP selaku Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal.
4. Bapak Unggul Sugi Harto, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 dengan tulus membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Agus Setio Widodo, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 yang juga dengan tulus membimbing dan meluangkan waktu dalam bimbingan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal, semoga segala dedikasi, ilmu, pengalaman dan motivasi yang diberikan menjadi hasil yang bermanfaat untuk diterapkan dan diamalkan.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang yang telah memberikan izin penelitian sehingga penelitian dapat dilakukan dan penyusunan skripsi dapat terselesaikan.
8. Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti tegal yang tak kenal lelah dalam memberi pelayanan administrasi bagi mahasiswa.

Ucapan terima kasih yang setulusnya penulis ucapkan, semoga segala amal dan bantuan mereka dapat tergantikan sebaik-baik pahala amal ibadah yang Allah SWT berikan. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini maka kritik dan saran yang membangun penulis perlukan dari para pembaca di sini. Semoga apa yang dapat dipelajari dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Pemalang, 9 Mei 2024

Dimas Rizki Al-faidzi

# DAFTAR ISI

[PERNYATAAN KEASLIAN i](#_Toc170550897)

[PERSETUJUAN ii](#_Toc170550898)

[PENGESAHAN iii](#_Toc170550899)

[MOTTO iv](#_Toc170550900)

[PERSEMBAHAN v](#_Toc170550901)

[KATA PENGANTAR vi](#_Toc170550902)

[DAFTAR ISI viii](#_Toc170550903)

[DAFTAR GAMBAR x](#_Toc170550904)

[DAFTAR TABEL xi](#_Toc170550905)

[ABSTRAK xii](#_Toc170550906)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc170550907)

[I.1 Latar Belakang 1](#_Toc170550908)

[I.2 Rumusan Masalah 9](#_Toc170550909)

[I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 9](#_Toc170550910)

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11](#_Toc170550911)

[II.1 Penelitian Terdahulu 11](#_Toc170550912)

[II.2 Kerangka Teori 19](#_Toc170550913)

[II.3 Definisi Konsep 30](#_Toc170550914)

[II.4 Pokok Penelitian 31](#_Toc170550915)

[II.5 Alur Pikir 33](#_Toc170550916)

[BAB III METODE PENELITIAN 34](#_Toc170550917)

[III.1 Jenis dan Tipe Penelitian 34](#_Toc170550918)

[III.2 Jenis dan Sumber Data 35](#_Toc170550919)

[III.3 Informan Penelitian 36](#_Toc170550920)

[III.4 Teknik Pengumpulan Data 36](#_Toc170550921)

[III.5 Teknik Analisis Data 37](#_Toc170550922)

[III.6 Sistematika Penulisan 38](#_Toc170550923)

[BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 39](#_Toc170550924)

[IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Pemalang 39](#_Toc170550925)

[IV.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 40](#_Toc170550926)

[BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61](#_Toc170550927)

[V.1 Hasil Penelitian 62](#_Toc170550928)

[V.2 Pembahasan Hasil Penelitian 87](#_Toc170550929)

[BAB VI PENUTUP 91](#_Toc170550930)

[VI.1 Kesimpulan 91](#_Toc170550931)

[VI.2 Saran 92](#_Toc170550932)

[DAFTAR PUSTAKA 93](#_Toc170550933)

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar 1. 1 Timbunan Sampah di TPA Pesalakan, Pemalang 6](#_Toc157168187)

[Gambar 1. 2 Alat berat dan kendaraan rusak di TPA Pesalakan pemalang 8](#_Toc157168188)

[Gambar 2. 1 Proses manajemen strategi 24](#_Toc157168216)

[Gambar 2. 2 Alur pikir 33](#_Toc157168217)

[Gambar 4. 1 Bagan Struktur Organisasi DLH Kabupaten Pemalang 44](#_Toc158468689)

[Gambar 5. 1 Penghijauan lahan controlled landfill (pohon mangga) 76](#_Toc170048374)

# DAFTAR TABEL

[Tabel 1. 1 Timbulan Sampah Kabupaten Pemalang 2](#_Toc167183159)

[Tabel 1. 2 Capaian pengelolaan sampah Kabupaten Pemalang 5](#_Toc167183160)

[Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 14](#_Toc167183166)

[Tabel 4. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian 56](#_Toc158468831)

[Tabel 4. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi 56](#_Toc158468832)

[Tabel 4. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 57](#_Toc158468833)

[Tabel 4. 4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 57](#_Toc158468834)

[Tabel 4. 5 Sarana dan Prasarana 59](#_Toc158468835)

[Tabel 5. 1 Daftar Informan 61](#_Toc167183168)

# ABSTRAK

Dimas Rizki Alfaidzi, 2120600010. Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemrosesan Akhir Sampah Di Kabupaten Pemalang. Skripsi. Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I: Bapak Unggul Sugi Harto, S.IP., M.Si., Pembimbing II: Bapak Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si.

*Pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang menjadi salah satu masalah yang signifikan, dimana pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang belum memenuhi standar pengelolaan sampah dengan baik dan berkelanjutan yang selaras dengan undang-undang pengelolaan sampah. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Namun pemrosesan akhir sampah di TPA Pesalakan Kabupaten Pemalang baru sekedar pengangkutan dan penimbunan sampah tanpa adanya pemrosesan akhir sampah yang berkelanjutan sehingga mengalami penumpukan sampah di TPA menyebabkan status TPA overload. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pemrosesan akhir sampah dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemrosesan akhir sampah. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pemrosesan akhir sampah dengan controlled landfill yang dilakukan di TPA Pesalakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang secara keseluruhan tidak berhasil dilakukan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang mengambil strategi untuk mengatasi beban sampah dalam pemrosesan akhir di TPA dengan melakukan program revitalisasi TPA, meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, penguatan koordinasi antar stake holder.*

***Kata kunci: Strategi, pemrosesan akhir sampah***

**ABSTRACT**

Dimas Rizki Alfaidzi, 2120600010. The strategy of the Environmental Agency in the final processing of waste in Pemalang Regency. Thesis. Government Science Universitas Pancasakti Tegal. Supervisor I: Mr. Unggul Sugi Harto, S.IP., M.Si., Supervisor II: Mr. Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si.

*Waste management in Pemalang Regency is one of the significant problems, where waste management in Pemalang Regency has not met the standards of waste management properly and sustainably which are in line with the waste management law. Final waste processing is a waste handling activity at the Waste Final Processing Site (TPA) in the form of safely returning waste or residues from previous processing to environmental media. However, the final processing of waste at the Pesalakan Landfill, Pemalang Regency is only transporting and stockpiling waste without sustainable final waste processing so that the accumulation of waste in the landfill causes the status of the landfill to be overloaded. The purpose of this study is to describe how the strategy carried out by the Pemalang Regency Environmental Agency in the final processing of waste and describe the supporting and inhibiting factors in the implementation of final waste processing. The method of this research is qualitative descriptive. Data collection techniques are carried out by interviews, observations, and documentation. The results of the study show that the Environmental Agency's Strategy in the final processing of waste with controlled landfill carried out at the Pesalakan Landfill by the Pemalang Regency Environmental Agency as a whole was not successfully implemented. The Pemalang Regency Environment Agency has taken a strategy to overcome the burden of waste in final processing at the landfill by conducting a landfill revitalization program, increasing the reach of waste services, increasing community involvement in waste management, and strengthening coordination between stakeholders.*

***Keywords: Strategy, final processing of garbage***

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang menjadi salah satu masalah yang signifikan, dimana pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang belum memenuhi standar pengelolaan sampah dengan baik dan berkelanjutan yang selaras dengan undang-undang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan proses sistematis dan berkelanjutan yang melibatkan upaya terorganisir untuk mengurangi dan mengendalikan sampah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Artikel yang berjudul *Waste Management* tahun 2021, membahas proses pengelolaan sampah yang yang melibatkan beberapa tindakan seperti pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pengurangan sampah. Tindakan ini dilakukan di bawah pengawasan dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan (Nabila Zahra Nur Aminah dan Adina Muliawati, 2021)

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang terorganisir, menyeluruh, dan berkesinambungan dengan aspek pengurangan dan penanganan sampah (UU NO.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah). Pengurangan sampah merupakan kegiatan yang meliputi; pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah; dan pemanfaatan kembali sampah. Secara umum masyarakat mengenali ketiga kegiatan pengurangan sampah tersebut dengan prinsip 3R atau *reduce, reuse, recycle* yang merupakan cara mengurangi sampah dengan memanfaatkan kembali sampah dengan mendaur ulang.

Penanganan sampah merupakan kegiatan yang meliputi:

1. Pemilahan, yaitu proses pengkategorian dan pemisahan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan/atau karakteristiknya.
2. Pengumpulan, yaitu kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
3. Pengangkutan, yaitu kegiatan dalam upaya membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. Pengolahan, merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
5. Pemrosesan akhir sampah, yaitu kegiatan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman (*UU NO.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*.).

**Tabel 1. 1 Timbulan Sampah Kabupaten Pemalang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Provinsi** | **Kabupaten/Kota** | **Timbulan Sampah Harian (ton)** | **Timbulan Sampah Tahunan (ton)** |
| 2022 | Jawa Tengah | Kab. Pemalang | 593.68 | 216,694.51 |
| 2021 | Jawa Tengah | Kab. Pemalang | 588.60 | 214,837.39 |
| 2020 | Jawa Tengah | Kab. Pemalang | 391.70 | 142,970.65 |
| 2019 | Jawa Tengah | Kab. Pemalang | 390.84 | 142,657.91 |
|  |  |  | **1,964.82** | **717,160.47** |

Sumber: (SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional)https://sipsn.menlhk.go.id/ diakses Oktober 2023

Menurut data diatas dapat dilihat bahwa timbulan sampah di Kabupaten Pemalang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.500.754 Jiwa (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang*, 2023) dan kegiatan penduduk di setiap harinya membuat produksi timbulan sampah sehingga perlu peran penting pemerintah dalam pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah badan pengelola yang membidangi pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang. Dalam (Peraturan Bupati Pemalang No. 74 Tahun 2021) tentang kedudukan susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum pada Pasal 4, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengelola masalah lingkungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pada Pasal 12 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pengendalian dan konservasi Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

1. Menyiapkan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta bidang pemeliharaan lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui (Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pegelolaan Sampah) pada Pasal 10 dijelaskan bahwa penanganan sampah oleh pemerintah daerah dengan cara antara lain:

1. Pemilahan;
2. Pengumpulan;
3. Pengangkutan;
4. Pengolahan; dan
5. Pemrosesan akhir sampah.

Setelah kegiatan penanganan sampah yang melalui pemilahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, atau sifat sampah, kemudian pengumpulan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan sampah dari sumber tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, langkah terakhir kegiatan penanganan sampah selanjutnya adalah pemrosesan akhir sampah yang dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) sesuai dengan data KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) masih terdapat 35% TPA di Indonesia yang melakukan *open dumping* dalam pemrosesan akhir(Wulandari & Puspa, 2022)*.* Seperti diwartakan Thohir dalam Antara kalsel, penanganan sampah di Kalimantan Selatan mayoritas di TPA yang ada masih dilakukan *open dumping* (Thohir, 2022)*.* Hal serupa masih dijumpai di TPA Pesalakan Kabupaten Pemalang yang mana terdapat gunungan timbunan sampah akibat pembuangan terbuka *(open dumping).*

Pemrosesan akhir sampah merupakan kegiatan dalam upaya pengembalian sampah atau residu dari hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan penanganan sampah di TPA yang mencakup aspek:

* 1. penimbangan sampah,
  2. pembongkaran sampah,
  3. perataan sampah dengan *dozer,*
  4. pengurugan sampah dengan tanah,
  5. teknologi ramah lingkungan.

Kegiatan tersebut berkaitan dengan implementasi pasal 22 PP No. 81 Tahun 2012 pemrosesan akhir di TPA untuk dilakukan dengan sistem lahan urug terkendali, sistem lahan urug saniter, dan teknologi ramah lingkungan.

**Tabel 1. 2 Capaian pengelolaan sampah Kabupaten Pemalang**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Kabupaten/Kota | Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) | Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun) | Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun) | Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun) | Daur Ulang Sampah Tahunan (ton/tahun) |
| 2022 | Pemalang | 216.694,51 | 56.081,45 | 128.936,62 | 185.018,06 | 56.081,45 |
| 2021 | Pemalang | 214.837,39 | 51.628,34 | 120.961,00 | 172.589,34 | 25.810,44 |
| 2020 | Pemalang | 142.970,65 | 30.262,27 | 84.826,00 | 115.088,27 | 4.274,27 |
| 2019 | Pemalang | 142.657,91 | 29.236,68 | 59.239,50 | 88.476,18 | 2.796,96 |

Sumber: (SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) <https://sipsn.menlhk.go.id/> diakses Oktober 2023

Tabel tersebut merupakan capaian pengelolaan sampah yang dapat ditangani oleh pemerintah Kabupaten Pemalang dalam upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah dalam 4 tahun terakhir. Dari rata-rata timbulan sampah pertahun di kisaran dua ratus ton pertahun pengurangan sampah yang dapat dilakukan masih jauh memperoleh angka yang tinggi karena dalam pengurangan sampah hanya di dapat pada angka 30-50ton pertahun dari 200ton timbulan sampah pertahun. Sementara itu dalam penanganan sampah lumayan lebih banyak dalam pencapaian angkanya, dari 200ton timbulan sampah pertahun upaya penanganan sampah mampu mencapai angka rata-rata 120ton pertahun, artinya upaya penanganan sampah di Kabupaten Pemalang sudah mencapai setengahnya dari rata-rata 200ton timbulan sampah pertahun.

Namun kenyataan di lapangan dalam pemrosesan akhir sampah masih terdapat timbunan sampah yang menggunung akibat pembuangan terbuka (*open dumping)* dalam pelaksanaan pemrosesan akhir sampah di TPA. Pemrosesan akhir sampah di TPA Pesalakan Kabupaten Pemalang baru sekedar pengangkutan dan penimbunan sampah tanpa adanya pemrosesan akhir sampah yang berkelanjutan sehingga mengalami penumpukan sampah di TPA menyebabkan status TPA *overload* (KompasTV-Pekalongan, 2023). Setelah kegiatan awal dilaksanakan dalam pemrosesan akhir sampah selama ini hanya dilakukan pembuangan terbuka (*open dumping)* yang baru akan diupayakan dengan sistem pengolahan tertutup (*sanitary landfill)* dan belum menerapkan teknologi ramah lingkungan. Sehingga belum melakukan pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman, akibatnya terdapat gunungan timbunan sampah yang melebihi kapasitas.

Selain itu terlihat dengan jelas adanya suatu fenomena yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan masyarakat, yaitu penutupan TPA Pesalakan akibat bencana kebakaran serta belum maksimalnya pemrosesan akhir sampah di TPA sehingga menimbulkan timbunan sampah yang melebihi kapasitas mengakibatkan darurat penanganan sampah di wilayah Kabupaten Pemalang.

|  |
| --- |
|  |

Sumber: Dokumentasi penulis, 2023

**Gambar 1. 1 Timbunan Sampah di TPA Pesalakan, Pemalang**

Gambar di atas merupakan timbunan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir yang hanya dilakukan dengan *open dumping* atau sistem pembuangan terbuka. Akibat *open dumping* ini menghasilkan gunungan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sehingga membuat Tempat Pemrosesan Akhir menjadi *overload* sehingga mengakibatkan bau tidak sedap dan memunculkan dampak lain bagi masyarakat sekitar TPA. Akibatnya ada penolakan oleh warga Dusun Pesalakan Desa Pegongsoran atas pembuangan akhir sampah di TPA Pesalakan. Warga Dusun Pesalakan menolak pembuangan akhir karena kondisi TPA yang *overload* dan sampah berserakan di sekitar area TPA dan pemukiman warga. Warga Dusun Pesalakan memblokir pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pesalakan, aksi tersebut terjadi pada 5 September 2023. Aksi pemblokiran tersebut dilakukan oleh warga karena warga merasa geram dengan datangnya truk pengangkut sampah ke TPA saat kondisi yang sudah *overload* dan sedang terjadi kebakaran. Haryanto (32) Warga setempat dalam wawancara liputan puskapik.com Rabu, 6 September 2023 mengatakan *“Iya kita tutup paksa, kita minta jangan buang dulu, karena masih kebakaran. Kalau sampah dibuang terus, nanti apinya merembet ke pemukiman gimana?”* (Puskapik.com, 2023 [*https://www.puskapik.com/32540/berita/tpa-pesalakan-ditutup-lagi-darurat-sampah-ancam-pemalang/*](https://www.puskapik.com/32540/berita/tpa-pesalakan-ditutup-lagi-darurat-sampah-ancam-pemalang/) diakses 22 Oktober 2023).

Menurut data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, sebelumnya terdapat sekitar 250.000 ton sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dalam setiap harinya (KompasTV-Pekalongan, 2023) [*https://www.kompas.tv/regional/410116/sampah-berserakan-di-pemalang-tpa-overload-dan-ditutup-oleh-warga*](https://www.kompas.tv/regional/410116/sampah-berserakan-di-pemalang-tpa-overload-dan-ditutup-oleh-warga) diakses pada 22 Oktober 2023). Akibat penolakan dan penutupan TPA tersebut menyebabkan adanya penumpukkan sampah di tingkat kecamatan akibat tidak dapat mengakses TPA, sehingga sampah berserakan dan mengalami penumpukan pada TPS tiap kecamatan. Selain TPA yang *overload*, penanganan sampah di Kabupaten Pemalang belum seluruhnya dapat diolah dengan baik. Belum menerapkan konsep *waste to energy*, dan belum maksimalnya program *zero to waste* sehingga menimbulkan produksi sampah yang banyak.

Sampah menjadi energi *(WTE)* adalah proses pengolahan sampah dengan menghasilkan energi listrik atau panas dari pengolahan utama sampah. Proses ini melibatkan konversi bahan limbah yang tidak dapat didaur ulang menjadi panas, listrik, atau bahan bakar yang dapat digunakan melalui berbagai metode seperti pembakaran, gasifikasi, dan pencernaan *anaerobik* (Kothari dkk., 2010)

Selain belum adanya penerapan *WTE*, meningkatnya timbulan sampah (limbah padat) yang tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pemrosesan akhir sampah juga menjadi faktor masalah dalam pemrosesan akhir sampah seperti kurangnya jumlah alat berat untuk eksekusi penataan timbunan sampah di TPA.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Sumber: Dokumentasi penulis, 2023

**Gambar 1. 2 Alat berat dan kendaraan rusak di TPA Pesalakan pemalang**

Atas permasalahan yang terjadi di TPA tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang melalui instruksi Bupati mendatangkan enam alat berat untuk pemindahan tumpukan sampah di TPA dan pemindahan sementara TPA di lokasi bekas galian yang berada di Desa Surajaya. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang bersama Bupati Kabupaten Pemalang membentuk tim Gugus Tugas Darurat Pengelolaan Sampah Kabupaten Pemalang di Sasana Bhakti Praja pada 26 September 2023.

Berbagai masalah yang terdapat dalam pemrosesan akhir sampah di TPA, seperti kondisi TPA yang *overload* dan belum adanya pengelolaan sampah yang berkelanjutan, strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang memiliki pengaruh besar dalam merumuskan kebijakan untuk menangani masalah dalam pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Pemalang. Hal ini alasan mengapa penulis memilih Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagai objek penelitian dalam pemrosesan akhir sampah yang ditinjau dari aspek penimbangan sampah, pembongkaran sampah, perataan sampah, pengurugan sampah dengan tanah, dan penerapan teknologi ramah lingkungan dengan merumuskan strategi kebijakan yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: “Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemrosesan Akhir Sampah di Kabupaten Pemalang’’.

## I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana strategi kebijakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pemrosesan akhir sampah?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pemalang dalam pemrosesan akhir sampah?

## I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

* + - 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Ingin mendeskripsikan bagaimana strategi kebijakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pemrosesan akhir sampah.
2. Ingin mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemrosesan akhir sampah.
   * + 1. Manfaat Penelitian
3. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan sesuai dengan disiplin ilmu khususnya dalam penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Pegongsoran, Kabupaten Pemalang.
4. Manfaat praktis, hasil penemuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
5. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam menjalankan kegiatan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan kebijakan sehingga mewujudkan lingkungan yang bersih dan menghasilkan pengolahan sampah yang berkelanjutan.
6. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam pengurangan dan penangan sampah dengan sadar budaya pilah dan olah sampah.

1. Bagi mahasiswa

Hasil dalam penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat menambah bidang pengetahuannya dan sebagai bahan referensi agar mampu menyusun karya ilmiah dengan menganalisis fakta di lapangan sebagai bentuk implementasi hasil belajar yang diperoleh di perguruan tinggi.

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## II.1 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis memaparkan empat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang diambil penulis yaitu Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemrosesan Akhir Sampah di Kabupaten Pemalang.

Pertama: Nugraha (2021) dengan judul, Manajemen Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. Fokus penelitian ini mendeskripsikan strategi pengelolaan sampah di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat dengan studi kasus di eks pasar inpres Desa Wailiang Kecamatan Kota. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah dan merumuskan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data.

Temuan penelitian ini menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, antara lain infrastruktur yang belum memadai, kesadaran masyarakat yang kurang, dan anggaran yang tidak mencukupi. Sehingga merumuskan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang meliputi perbaikan infrastruktur, peningkatan kesadaran masyarakat, dan optimalisasi alokasi anggaran dan dalam strategi namun dalam pengelolaan sampah di Eks pasar inpres Kota Waikabubak belum berjalan dengan baik hal ini disebabkan masih banyak masalah dan kekurangan yang menghambat.

Penelitian kedua, Dewi (2022) dengan judul Tata Kelola Sampah Melalui Program Waste to Energy Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Wisata Edukasi Talangagung Kabupaten Malang. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Wisata Edukasi Talangagung di Kabupaten Malang. Volume sampah di TPA Wisata Edukasi Talangagung merupakan yang tertinggi dibandingkan TPA lain di Kabupaten Malang dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan data sekunder yang berasal dari studi literatur yang berkaitan dengan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tata kelola.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan sampah di TPA Wisata Edukasi Talangagung dengan *waste to energy* dapat memenuhi prinsip tata kelola yang baik sehingga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Manfaatnya antara lain mengurangi volume sampah, mengurangi emisi gas rumah kaca, menghasilkan listrik, dan menciptakan lapangan kerja.

Penelitian ketiga, (Pradana & Subowo, 2017) dengan judul Studi Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Fokus penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Pemerintah Daerah Kota Semarang mengimplementasikan penanganan sampah di TPA Jatibarang berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012. Penanganan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang untuk mengelola sampah di Kota Semarang dengan implementor kebijakan tersebut adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Penelitian tersebut melihat lima fenomena dalam implementasi, yaitu pewadahan dan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, teknik analisis data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pengelolaan sampah di Kota Semarang, yang dituangkan dalam Perda No. 6/2012 tentang Pengelolaan Sampah, telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh pemerintah daerah. Namun, ada beberapa daerah yang tidak sepenuhnya mematuhi peraturan karena keterbatasan sumber daya dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, dan alokasi anggaran. Proses pengelolaan sampah, termasuk pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan, telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan peraturan, namun pelaksanaannya belum mencapai hasil yang optimal karena keterbatasan sumber daya. Penggunaan teknologi pengolahan sampah modern membutuhkan anggaran yang tinggi, mengarahkan pemerintah untuk mencari solusi alternatif seperti kolaborasi dengan Pemerintah Denmark dan investor swasta untuk mengubah sampah lama dan baru menjadi energi listrik dan pupuk organik.

Penelitian ke empat (Ermayendri dkk., 2022) dengan Judul “*Cost Benefit Analysis* Dalam Peningkatan Metode Landfilling Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Studi Kasus: TPA Air Sebakul Kota Bengkulu”. Fokus penelitian ini adalah pada analisis biaya-manfaat perbaikan metode pembuangan akhir limbah padat di TPA Air Sebakul di Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis metode (*final disposal*) sebagai tujuan teknis akhir dari operasi pengolahan sampah dengan menggunakan metode *CBA* untuk membandingkan manfaat dan biaya dari 3 metode penimbunan dengan 2 skenario: Skenario A, berupa peningkatan sistem pemrosesan akhir sampah dari metode *open dumping* ke metode *control landfill*. Skenario B, berupa peningkatan sistem pemrosesan akhir sampah dari metode *open dumping* (Semi *control landfill*) ke metode *Control landfill*.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa teknis pengelolaan sampah mulai dari timbulan sampai pada tahap pemrosesan akhir membutuhkan biaya. Metode *Cost-Benefit Analysis (CBA)* digunakan untuk menghitung besaran biaya investasi dan manfaat total dalam optimasi tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) Air Sebakul. Sementara metode open dumping menunjukkan nilai total manfaat yang lebih kecil dibandingkan total biaya yang dikeluarkan. Total nilai manfaat menjadi semakin besar dari open dumping ke metode control landfill (skenario A). Saran dari penelitian ini agar ada penelitian lanjutan yang lebih kompleks terkait *CBA* pada pengelolaan sampah.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, penulis memaparkan inti penelitian terdahulu dengan perbedaan penelitian sekarang.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama/ Judul** | **Metode Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Perbedaan Penelitian** |
|  | Erlin Bela Ngura (2021)  “Manajemen Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat”. | Deskriptif Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan sampah, antara lain infrastruktur yang belum memadai, kesadaran masyarakat yang kurang, dan anggaran yang tidak mencukupi. untuk mengatasi permasalahan tersebut terumuskan strategi namun dalam pengelolaan sampah di Eks pasar inpres Kota Waikabubak masih belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak masalah dan kekurangan yang menghambat. | Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2021, fokus penelitian pada strategi pengelolaan sampah di Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat dengan studi kasus di eks pasar inpres Desa Wailiang Kecamatan Kota. perbedaan dengan penelitian sekarang dilakukan tahun 2023 dan berfokus pada strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Pemalang.  Memperluas penelitian sebelumnya, penulis mengklarifikasi elemen-elemen penting dari penyelidikan sebelumnya, menekankan perbedaan dalam penelitian saat ini. |
|  | Rika Puspita Dewi (2022)  “Tata Kelola Sampah Melalui Program Waste to Energy Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Wisata Edukasi Talangagung Kabupaten Malang”. | Deskriptif kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan sampah di TPA Wisata Edukasi Talangagung dengan *waste to energy* dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Manfaatnya antara lain mengurangi volume sampah, mengurangi emisi gas rumah kaca, menghasilkan listrik, dan menciptakan lapangan kerja. | Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2022 dengan objek penelitian TPA Wisata edukasi Talangagung. Teori yang digunakan tata kelola dengan konsep *waste to energy*. Perbedaan dengan penelitian sekarang terdapat pada objek penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Pemalang, penelitian sekarang dilakukan tahun 2023. |
|  | Pradana Ari & Subowo Ari, (2017) “Studi Penanganan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah” | Kualitatif Deskriptif | Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik pengelolaan sampah di Kota Semarang, yang dituangkan dalam Perda No. 6/2012 tentang Pengelolaan Sampah, telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh pemerintah daerah. Namun, ada beberapa daerah yang tidak sepenuhnya mematuhi peraturan karena keterbatasan dalam infrastruktur, sumber daya manusia, dan alokasi anggaran. | Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2017 dengan fokus penelitian implementasi penanganan sampah di TPA Jatibarang berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012. Perbedaan dengan penelitian sekarang dilakukan tahun 2023, objek penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dengan teori strategi dan diambil judul Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pemrosesan Akhir Sampah di Kabupaten Pemalang. |
|  | (ERMAYENDRI dkk., 2022) dengan Judul “COST BENEFIT ANALYSIS DALAM PENINGKATAN METODE LANDFILLING TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH STUDI KASUS: TPA AIR SEBAKUL KOTA BENGKULU” | Kuantitatif dengan metode analisis *CBA* | Metode Cost-Benefit Analysis (CBA) digunakan untuk mengetahui biaya investasi dan manfaat keseluruhan dalam optimalisasi Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Air Sebakul. Meskipun metode dumping terbuka menghasilkan manfaat, seluruh nilai manfaat ini kurang dari seluruh biaya yang dikeluarkan. | Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2022 metode kuantitatif, objek penelitian TPA AIR SEBAKUL Kota Bengkulu. Perbedaan dengan penelitian sekarang terdapat pada metode penelitian, yakni deskriptif kualitatif dengan objek penelitian Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pemalang. Maka diambil judul penelitian Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemrosesan Akhir Sampah di Kabupaten Pemalang. |

Sumber: Telaah literatur, 2023

## II.2 Kerangka Teori

**II.2.1 Pengertian Strategi**

Istilah “strategi” berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang berarti seni memimpin pasukan. Secara umum strategi mencakup bagian keterampilan seperti taktik militer, pengepungan, logistik ataupun keterampilan lain. Menurut Hamel dan Prahalad dalam Rangkuti (2002) strategi merupakan rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya (Rangkuti, 2013).

Menurut Marus dalam umar (2001: 31) sebagaimana dikutip Bahri (2015) bahwa strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai (Bahri, 2015)

Kuncoro (2010:15) dalam Rintonga (2020) Buku *Ajar Manajemen Strategi (teori dan aplikasi)* mengemukakan, strategi sebagai suatu proses yang meliputi sejumlah tahapan yang saling berkaitan dan berurutan dengan tiga tahapan yaitu perencanaan strategi, implementasi strategi, dan pengawasan atu evaluasi. Berdasarkan definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan serangkaian rancangan jangka panjang yang diimplementasikan dengan kebijakan dalam seluruh proses kegiatan organisasi untuk menghadapi persaingan (Rintonga, 2020).

**II.2.2 Tingkatan Strategi**

Wheelen dan Hunger (2008:15) dalam (Rintonga, 2020) mengemukakan ada beberapa tingkatan dalam strategi untuk perusahaan besar.

1. Strategi Korporasi

Merupakan strategi yang mencerminkan arah perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk menciptakan perkembangan bagi perusahaan atau organisasi secara keseluruhan.

1. Strategi level bisnis

Merupakan strategi yang digunakan dalam bisnis dengan fokus pada perbankan bersaing produk pada segmen tertentu. Dalam tingkat ini terdapat tiga strategi yang digunakan antara lain:

1. Strategi kepemimpinan biaya
2. Strategi diferensiasi
3. Strategi fokus
4. Strategi fungsional

Strategi yang digunakan pada level kegiatan fungsional seperti operasional, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Strategi ini disebut juga *value-based-strategy* yang berfokus pada memaksimalkan produktivitas sumber daya yang digunakan dalam memberikan value terbaik terhadap pemenuhan kebutuhan pelanggan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi memiliki beberapa tingkatan dengan tujuannya maing-masing untuk diterapkan dalam perencanaan jangka panjang didalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan kegiatan yang telah direncanakan dalam waktu yang ditentukan.

**II.2.3 Tujuan Strategi**

Rintonga (2020) menyebutkan tujuan pembuatan strategi antara lain:

* + - 1. Menjaga kepentingan
      2. Memberikan gambran tujuan
      3. Mengembangkan kreativitas dan inovasi
      4. Sebagai sarana evaluasi

**II.2.4 Formulasi Strategi**

1. Visi dan Misi Organisasi

Dalam strategi suatu perusahaan atau organisasi terdapat formulasi strategi dari organisasi itu sendiri. Menurut David (2015:44) dalam Rintonga (2020) Buku *Ajar Manajemen Strategi (teori dan aplikasi)* menurutnya banyak organisasi mengembangkan dengan baik visi dan misi. Pernyataan misi merupakan deklarasi tentang keberadaan organisasi sedangkan pernyataan visi merupakan jawaban atas pertanyaan terhadap keinginan organisasi.

Visi dan misi menjelaskan nilai dan tujuan agar dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak di luar organisasi dengan maksud menguatkan komitmen organisasi dalam kegiatan yang bertanggungjawab, mempertahankan dan melindungi organisasi dalam kelanjutan jangka panjang untuk organisasi.

1. Tujuan

Tujuan dalam formulasi strategi adalah upaya pengembangan dari visi misi yang telah dibuat oleh organisasi. Dalam poin ini untuk mempertegas tujuan apa yang nantinya akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi, dari tujuan tersebut diupayakan untuk memperoleh sasaran yang akan dituju.

1. Sasaran

Sasaran ini merupakan objek yang dituju dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam formulasi strategi tersebut. Bagaimana sasaran yang ada, siapa sasaran yang dituju dalam pelaksanaan kebijakan nantinya.

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan formulasi strategi dari pengembangan visi misi, tujuan, dan sasaran. Dari formulasi strategi tersebut dirumuskan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran dari pengembangan visi misi suau organisasi. Dalam hal ini kebijakan yang dirumuskan akan dilaksanakan nantinya dalam pelaksanaan strategi yang telah dibuat.

**II.2.5 Pengertian Manajemen Strategi**

Stephen P. Robins dalam Buku *Manajemen (2014)* manajemen strategi adalah tugas penting yang dilakukan oleh manajer untuk mengembangkan strategi organisasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian (Robbins dkk., 2014)

Sesuai pendapat Wheelen dan Hunger dalam Buku *Manajemen Strategis (2020),* manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan aktivitas manajemen yang menentukan keberhasilan jangka panjang suatu bisnis atau kepentingan organisasi. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan strategis, implementasi atau penerapan dan evaluasi. Wheelen dan Hunger menekankan pengambilan keputusan dan tindakan manajemen untuk keberhasilan jangka panjang organisasi. Dengan demikian hal ini didasarkan pada analisis lingkungan, perumusan dan implementasi strategi yang tepat, serta evaluasi dan pemantauan yang terencana.

Barney (2007) dalam Buku *Ajar Manajemen Strategis (2020)* Manajemen strategis dapat dipahami sebagai proses pemilihan dan penerapan strategi. Strategi adalah model alokasi sumber daya yang memungkinkan organisasi mempertahankan operasinya. Sedangkan menurut Rachmat (2014: 16) dalam Rintonga (2020), manajemen strategis adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang efektif atau membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen strategis adalah untuk menyelaraskan integrasi manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, penelitian dan pengembangan pada pelaksanaan kegiatan organisasi.

**II.2.6 Konsep Manajemen Strategi**

Richard Vancil (Harvard University) dalam Buku *Manajemen Strategik (2020)* memperkenalkan gagasan strategi dalam bukunya “Strategi adalah sebuah organisasi atau sub unit sebuah organisasi lebih besar, yaitu sebuah konseptualisasi yang dinyatakan atau diaplikasikan oleh pemimpin organisasi dengan menyangkut:

1. Sasaran jangka panjang atau tujuan organisasi tersebut.
2. Kendala luas dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin, atau yang diterimanya dari atasan yang membatasi skup aktivitas organisasi yang bersangkutan dan
3. Kelompok-kelompok rencana dan tujuan jangka pendek yang telah diterapkan dengan harapan bahwa mereka akan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Tujuan dari strategi adalah untuk mempertahankan dan mencapai posisi yang unggul dibandingkan dengan pihak pesaing. Organisasi harus berusaha untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan kemungkinan dalam lingkungan yang memungkinkannya untuk memanfaatkan bidang keahliannya.

**II.2.7 Proses Manajemen Strategik**

Manajemen strategik merupakan proses yang menggabungkan tiga aktivitas yang terkait dengan: analisis, perumusan dan pelaksanaan strategi. Kuncoro (2010:172) dalam Rintonga (2020) Buku *Ajar Manajemen Strategi (teori dan aplikasi)* bahwa proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan yaitu: formulasi strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi dengan digambarkan pada gambar berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Formulasi strategi | Implementasi strategi | Evaluasi dan pengawasan | | Misi  objektif  Strategi  Kebijakan | Prosedur  Anggaran  Program | Kinerja |  |  | | --- | | Pengamatan  Lingkungan | | Eksternal |     Lingkungan  Tugas  Lingkungan  Sosial  Internal  Struktur  Budaya  Sumber daya  Umpan balik |

Sumber: 1 Indrajit, R. E. (2013). Manajemen Strategis Model Hunger-Wheelen. E-Artikel Sistem Dan Teknologi Informasi, 4, 1-4.(Indrajit, 2013)

**Gambar 2. 1 Proses manajemen strategi**

Perumusan strategi merupakan bagian dari mengembangkan misi organisasi, mengenali peluang dan ancaman eksternal organisasi, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang bagi organisasi menghasilkan strategi dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan. Implementasi strategi merupakan bagian mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi. Evaluasi strategi merupakan tahapan akhir dalam manajemen strategi sehingga para manajer perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik.

Sesuai grand teori yang sudah dijelaskan di atas tentang konsep strategi dan manajemen strategi, grand teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori model strategi milik wheelen-Hunger agar terumuskan strategi kebijakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pemalang dalam pemrosesan akhir di TPA dengan tahapan perencanaan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi. Sehingga nantinya dalam pemrosesan akhir di TPA menerapkan kebijakan dalam jangka panjang yang dilandasi undang-undang pengelolaan sampah.

**II.2.8 Pengertian Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah merupakan bagian penting dalam penanganan sampah untuk merubah sampah menjadi bentuk yang lebih baik dan tidak mencemari lingkungan serta mengurangi jumlah sampah yang ditimbun di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan sampah merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang terdiri dari dua komponen yaitu pengurangan dan penanganan sampah sehingga dalam pengelolaan sampah harus memenuhi beberapa asas.

**II.2.9 Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah terbagi dalam dua bagian. Pada bagian kesatu tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan pengelolaan sampah spesifik. Pada pasal 19 dijelaskan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari dua komponen yaitu; pengurangan sampah, dan penanganan sampah.

**a. Pengurangan sampah**

Pasal 20 ayat (1) dijabarkan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 meliputi kegiatan:

1. Pembatasan timbulan sampah;
2. Pendauran ulang sampah; dan
3. Pemanfaatan kembali sampah

Secara umum ketiga kegiatan pengurangan sampah tersebut dapat dipahami juga dengan prinsip 3R atau *reduce, reuse, recycle* yang merupakan cara mengurangi sampah dengan memanfaatkan kembali sampah dengan mendaur ulang. Dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan tersebut yang diuraikan pada ayat (1) antara lain:

1. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
2. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
3. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
4. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
5. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

**b. Penanganan sampah**

Penanganan sampah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) kegiatan penanganan sampah yang dimaksud dalam pasal 19 huruf b meliputi:

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

**II.2.10 Jenis sampah yang dikelola**

Dalam Buku *Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan di Kota Metro* (Yudiyanto dkk., 2019) sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai utama dalam pembuatan atau pemakaian barang yang rusak atau cacat dalam pembuatan manufaktur atau materi yang telah ditolak dan dibuang. Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang meliputi:

1. Sampah rumah tangga
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga, dan
3. Sampah spesifik.

Limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sesuatu dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/fasilitas lainnya. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. Sampah yang timbul akibat bencana;
4. Puing bongkaran bangunan;
5. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
6. Sampah yang timbul secara periodik.

**II.2.11 Aspek Penyelesaian Masalah Sampah**

Sri Bebassari dari *Indonesian* *Waste Forum* *(IWF)* dalam Buku *Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan di Kota Metro* (Yudiyanto dkk., 2019) mengatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah sampah dapat dilakukan dengan tinjauan lima aspek yang meliputi:

1. Aspek Hukum

Terdapat kelemahan utama dari sistem pengelolaan sampah saat ini yakni tidak ada kebijakan secara nasional yang berakibat pada tidak menentunya peraturan daerah dalam menentukan pijakan hukumnya.

1. Aspek Institusi

Permasalahan sampah menjadi berlarut-larut akibat tidak adanya Badan Khusus yang menangani isu ini.

1. Aspek Pendanaan

Hingga saat ini masyarakat masih menganggap sampah hanya merupakan barang buangan atau tidak memiliki nilai. Padahal jika masyarakat merubah penanganannya sampah bisa menjadi investasi yang mendatangkan keuntungan sehingga permasalahan sampah dapat teratasi.

1. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat yang masih rendah sehingga bagaimana pemerintah harus mendorong peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan sadar budaya pilah sampah.

1. Teknologi

Dalam pendapatnya Sri Bebassari menuturkan butuh waktu hingga 25 tahun mendatang paling tidak agar pengelolaan sampah kita harus sudah dimulai dari sumbernya dengan penerapan teknologi yang diandalkan.

**II.2.12 Pemrosesan akhir sampah**

Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman dengan aspek kegiatan;

1. penimbangan sampah,
2. pembongkaran sampah,
3. perataan sampah,
4. pengurugan sampah dengan tanah,
5. teknologi ramah lingkungan.

Dari aspek kegiatan tersebut mengacu pada PP No. 81 Tahun 2012 pasal 22 pemrosesan akhir di TPA untuk dilakukan dengan sistem lahan urug terkendali, sistem lahan urug saniter, dan teknologi ramah lingkungan.

## II.3 Definisi Konsep

Definisi konsepsional adalah pilihan teori oleh penulis yang diterapkan berdasarkan kerangka teori yang diambil sesuai dengan kriteria objek penelitian. Konsep adalah skema, model, atau teori yang implisit maupun eksplisit sehingga skema ini saling berkaitan dengan bagaimana suatu pengetahuan dihubungkan satu sama lainnya.

1. Strategi merupakan serangkaian proses rancangan jangka panjang dengan perumusan kebijakan yang diimplementasikan dalam seluruh proses kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan tahapan; proses penyusunan rencana, implementasi atau penerapan rencana, pengendalian atau pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana.
2. Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA) dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman dengan aspek kegiatan;
   1. penimbangan sampah,
   2. pembongkaran sampah,
   3. perataan sampah,
   4. pengurugan sampah
   5. teknologi ramah lingkungan.

Dari aspek kegiatan tersebut mengacu pada PP No. 81 Tahun 2012 pasal 22 pemrosesan akhir di TPA untuk dilakukan dengan sistem lahan urug terkendali, sistem lahan urug saniter, dan teknologi ramah lingkungan.

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Sampah rumah tangga adalah sampah sisa kegiatan yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga berupa sampah organik dan sampah anorganik.
3. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
4. Sampah spesifik adalah sampah B3 atau sampah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya.

## II.4 Pokok Penelitian

Berdasarkan definisi konsep di atas maka dapat diambil pokok-pokok penelitian yaitu strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Pemalang merupakan proses perencanaan jangka panjang dengan perumusan kebijakan yang melalui tiga tahapan yaitu: perencanaan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi dalam pemrosesan akhir sampah yang ditinjau dari aspek:

* 1. Penimbangan sampah,
  2. Pembongkaran sampah,
  3. Perataan sampah,
  4. Pengurugan sampah,
  5. Teknologi ramah lingkungan.

## II.5 Alur Pikir

Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam pemrosesan akhir sampah

Implementasi Strategi

Perencanaan Strategi

Evaluasi

* Visi
* Misi
* Tujuan
* Sasaran
* Kebijakan
* Kinerja
* Program
* Anggaran
* Prosedur

Strategi berhasil atau tidak berhasil

**Gambar 2. 2 Alur pikir**

# BAB III METODE PENELITIAN

## III.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan menggambarkan teori pada kondisi subjek dan objek dengan berdasarkan peristiwa yang terjadi untuk memberikan suatu gambaran secara sistematis mengenai fakta atau fenomena yang ada di lapangan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (1994) dalam buku *metode penelitian kualitatif* (Anggito & Setiawan, 2018) menyatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Penelitian kualitatif berlandaskan filsafat postpositivisme karena penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah atau lawannya eksperimen, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2011). Menurut Bogdan dan Biklen (1982: 27-29) dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif* Albi Anggito dan Johan Setiawan (2018) ada beberapa karakteristik penelitian kualitatif: (1) Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen). Langsung pada sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci, (2) penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang disajikan bersifat kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. (3) penelitian kualitatif lebih berfokus pada proses daripada produk atau outcome, (4) analisis data dilakukan secara induktif, (5) penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada data yang teramati.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan fenomena berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan data yang disajikan berupa kata-kata dan gambar. Maka dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti bermaksud mendeskripsikan dan mendapat pemahaman mengenai strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam proses akhir sampah di Kabupaten Pemalang.

## III.2 Jenis dan Sumber Data

III.2.1 Jenis Data

1. Data Kualitatif

Merupakan data yang tidak berbentuk angka, jadi diartikan bahwa data yang ada berupa kata, kalimat, atau gambar.

1. Data Kuantitatif

Secara sederhananya data kuantitatif berupa angka atau numerik atau data yang diangkakan atau scoring.

III.2.2 Sumber Data

1. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama dengan pengumpulan data observasi dan wawancara terhadap narasumber.

1. Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung pada pengumpul data, dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui tangan ketiga atau melalui penelusuran kepustakaan berupa catatan atau dokumen, buku, publikasi, undang-undang, peraturan dan laporan pemerintah terkait pengelolaan sampah.

## III.3 Informan Penelitian

Menurut Moleong (2006) dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif* (Anggito & Setiawan, 2018) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini, informan penelitian yang diambil antara lain;

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
2. Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
3. Kepala Sub Koordinator Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
4. Kepala UPT TPA Pesalakan Kabupaten Pemalang.

## III.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap permasalahan yang diteliti.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terhadap responden agar memberikan jawaban atau data atas masalah yang sedang diteliti, kemudian jawaban responden akan direkam dan dicatat sebagai pengumpulan data.

1. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2011) dalam Tri (2021) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan penting peristiwa yang telah berlalu, dokumen berupa tulisan, gambar, atau karya monumental. Dokumentasi yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini berupa tulisan dan foto.

## III.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah teknik analisis interaktif, menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Tri, (2021) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Tiga alur analisis interaktif tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses analisa data yang meliputi merangkum, memilah dan mengkategorikan data yang berkaitan dengan hal-hal pokok penelitian dengan fokus pada hasil temuan penelitian.

1. Penyajian Data

Penyajian data merupakan pengorganisasian data yang sudah direduksi, bentuknya dapat berupa narasi deskripsi, catatan lapangan, grafik, dan bagan sehingga menyajikan informasi data yang terstruktur dan mudah dipahami.

1. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman dalam (Tri, 2021) langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini peneliti menganalisa data secara mendalam hingga dapat menjawab permasalahan penelitian dan menarik kesimpulan penelitian. Kesimpulan yang ditarik memuat jawaban dari pertanyaan “apa” dan “bagaimana” strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam Proses akhir sampah di Kabupaten Pemalang.

## III.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menuliskan skema penulisan agar memudahkan pembaca dalam mempelajari dan memahami isi dari penelitian ini. Skema penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Penulisan dalam bab I memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

1. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulisan dalam bab II memuat penelitian terdahulu, kerangka teori, definisi konsep, pokok penelitian, dan alur pikir.

1. BAB III METODE PENELITIAN

Penulisan dalam bab III memuat jenis dan tipe penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan.

1. BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Penulisan dalam bab IV memuat deskripsi terkait demografi dan lokus penelitian agar pembaca dapat memahami lokasi dan obyek yang diteliti.

1. BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Punulisan dalam bab v berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan tujuan penelitian.

1. BAB VI PENUTUP

Penulisan dalam bab VI memuat isi dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

# BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

## IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang adalah sebuah kabupaten yang terletak di Jawa Tengah, menempati wilayah di sepanjang garis pantai utara pulau Jawa. Kabupaten Pemalang, yang membentang seluas 1.115,30 km2, memiliki lokasi geografis yang menguntungkan untuk perdagangan dan pemerintahan. Kabupaten Pemalang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Purbalingga di selatan, Kabupaten Pekalongan di timur, dan Kabupaten Tegal di barat.

Kabupaten Pemalang meliputi total 32,43 kilometer jalan raya nasional, 99,52 kilometer jalan provinsi, dan 651,97 kilometer jalan kabupaten. Segmen jalan ini memudahkan konektivitas transportasi antar kota dan provinsi. Kabupaten Pemalang telah membentuk jaringan komunikasi komprehensif yang terdiri dari 8.596 SSP, yang dilengkapi dengan kapasitas pusat dan konektivitas internet. Jaringan ini mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Pemalang.(jdih.pemalangkab.go.id)

Geografi Kabupaten Pemalang ditandai dengan kondisi yang sangat beragam. Bagian Utara adalah daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 meter di atas permukaan laut; bagian tengah adalah dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6–15 meter di atas permukaan laut; dan bagian Selatan adalah dataran tinggi dan pengunungan yang subur dan berhawa sejuk dengan ketinggian 16-925 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Pemalang dikelilingi oleh dua sungai besar, Sungai Waluh dan Sungai Comal. Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi beberapa desa dan kelurahan. Kecamatan Pemalang adalah pusat pemerintahan dan terdiri dari beberapa kecamatan lagi: Pemalang, Taman, Petarukan, Bantarbolang, Randudongkal, Moga, Warungpring, Belik, Pulosari, Watukumpul, Ampelgading, Bodeh, Comal, dan Ulujami.

Kabupaten Pemalang terkenal dengan beragam barang luar biasa, termasuk Pusat Tenun ATBM, pakaian konveksi, kerajinan kulit ular, dan sapu glagah, yang sangat dihormati oleh masyarakat luas. Selain itu, ada banyak kemungkinan lain di bidang ini. Kabupaten Pemalang memiliki beragam kesenian tradisional, termasuk sintren, kuntulan, dan berbagai bentuk lainnya, yang rajin dilestarikan. Pemalang menawarkan berbagai kuliner, termasuk Grombyang, sate Loso, Lontong Dekem, Tahu Campur, Apem Comal, dan ragi Arab.

Kabupaten Pemalang memiliki populasi 1.262.013 jiwa, dengan masyarakat yang memiliki budaya taat dan toleran, menunjukkan etos kerja yang kuat, dan menunjukkan semangat gotong royong yang kuat. Kualitas ini berkontribusi pada pengembangan dan kemajuan Kabupaten Pemalang dengan menumbuhkan modal sosial yang solid. Tujuan pembangunan Kabupaten Pemalang adalah menciptakan masyarakat yang bersatu di wilayah Pemalang yang memiliki karakter cerdas, sehat, berdaya saing, dan berakhlak mulia dalam kesatuan wilayah Kabupaten Pemalang yang ikhlas: indah, komunikatif, hijau, lancar, aman dan sehat merupakan visi Kabupaten Pemalang. Karena itu Pemalang dijuluki Kota Ikhlas.(https://pemalangkab.go.id/)

## IV.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

**IV.2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. DLH Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, DLH dipimpin oleh Kepala Dinas.

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2016 yang sejalan dengan Peraturan Daerah telah diberlakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pemalang. Peraturan ini mengatur kerangka kerja, pengaturan, tugas, tindakan, dan protokol operasi DLH. Pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2016 menguraikan fungsi dan tanggung jawab utama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari:
2. Sub Urusan Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH),
3. Sub Urusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Kabupaten,
4. Sub Urusan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Daerah Kabupaten,
5. Sub Urusan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten,
6. Sub Urusan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yaitu:

* penyimpanan sementara limbah B3,
* pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah,

1. Sub Urusan Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemenntah Daerah,
2. Sub Urusan Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yaitu:

* penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah,
* peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah,

1. Sub Urusan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah,
2. Sub Urusan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat tingkat Daerah,
3. Sub Urusan Pengaduan Lingkungan Hidup meliputi:

* usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
* usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah,

1. Sub Urusan Persampahan mengacu pada:

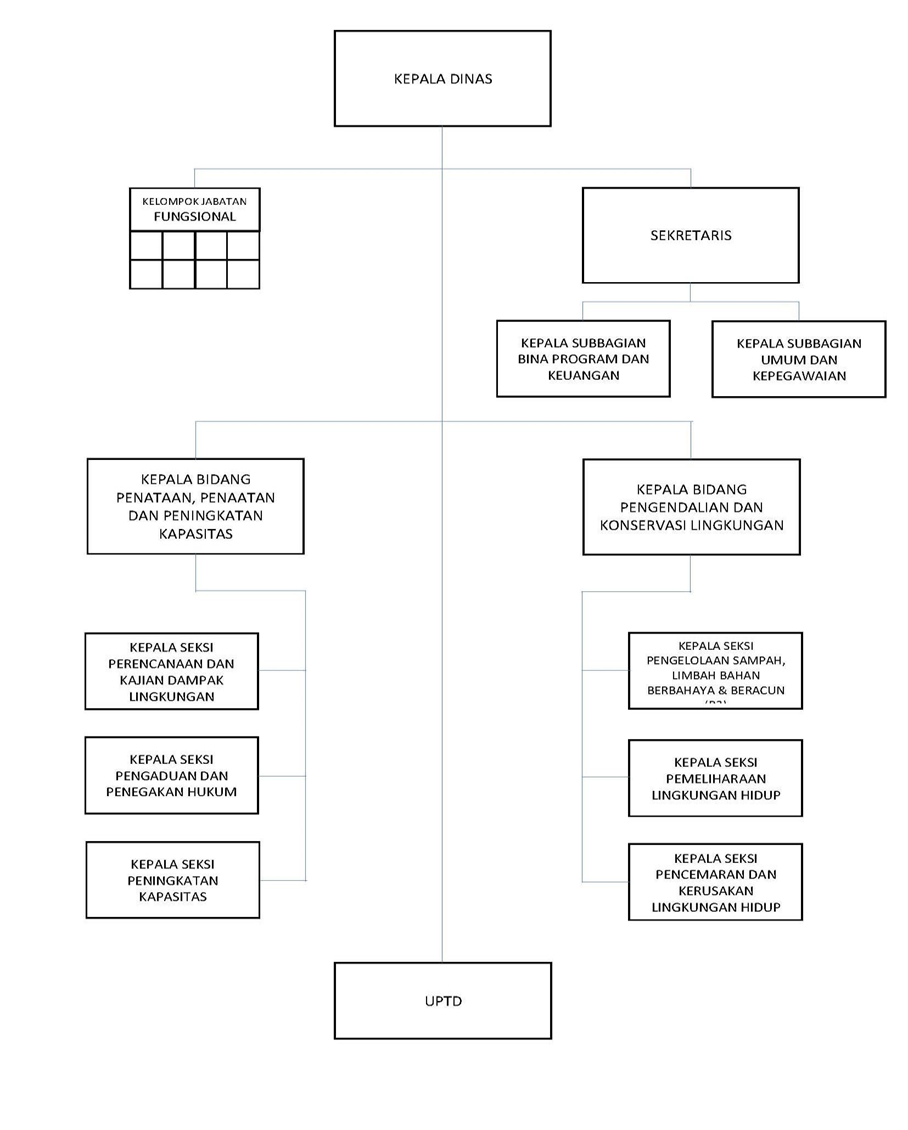
* pengelolaan sampah,
* penerbitan lzin pendaur ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta,
* pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

1. Selain melaksanakan tugas yang disebutkan di atas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga membantu Bupati melaksanakan tugas pembantuan, yang meliputi tugas dan fungsi antara lain:
   * + 1. Merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
       2. Melaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
       3. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
       4. Melaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
       5. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Pemalang No. 74 Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi:

1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat yang terdiri dari;
3. Subbagian bina program dan keuangan,
4. Subbagian umum dan kepegawaian.
5. Bidang penataan dan peningkatan kapasitas terdiri dari;
6. Subkoordinator perencanaan dan kajian dampak lingkungan,
7. Subkoordinator pengaduan dan penegakkan hukum,
8. Subkoordinator peningkatan kapasitas.
9. Bidang pengendalian dan konservasi lingkungan terdiri dari;
10. Subkoordinator pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),
11. Subkoordinator pencemaran dan kerusakan lingkungan,
12. Subkoordinator pemeliharaan lingkungan hidup.
13. UPTD,
14. Kelompok jabatan fungsional.

Bagan struktur organisasinya adalah sebagai berikut:



Sumber: website DLH Kabupaten Pemalang - https://dlh.pemalangkab.go.id

**Gambar 4. 1 Bagan Struktur Organisasi DLH Kabupaten Pemalang**

Sesuai dengan susunan organisasi di atas, secara hierarki tugas dan tanggung jawab diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala DLH memimpin dengan kedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretaris memimpin bagian sekretariat yang berposisi di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Kepala bidang memimpin bidang terkait yang posisinya dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
4. Kepala Seksi memimpin seksi terkait dengan kedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
5. Kepala UPT memimpin satuan Unit Kebersihan dan Persampahan (UKP) yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Uraian tugas dan tanggung jawab jabatan struktural berdasarkan susunan organisasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas:**
2. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Keija dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. Merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
4. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan aspek urusan teknis di bidang lingkungan hidup yang selaras dengan program dan kegiatan lingkungan hidup.
5. Mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang lingkungan hidup agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.
6. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat daerah, yang meliputi penetapan tujuan mengurangi sampah dan penyediaan sarana dan prasarana sampah, penentuan prioritas jenis sampah, penerbitan izin, dan memastikan pengawasan pengelolaan sampah yang efektif. Pedoman ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk merencanakan tugas pengelolaan limbah.
7. Mengembangkan inovasi inovasi untuk daerah dalam urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan memanfaatkan hasil analisis dan/atau teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
8. Tugas ini melibatkan pengawasan penyebaran dan penyampaian informasi terkait pemerintah yang berkaitan dengan masalah lingkungan, sejalan dengan persyaratan layanan publik dan pembaruan informasi publik.
9. Tugas ini melibatkan pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk masalah lingkungan pemerintah, memastikan kepatuhan terhadap indikator SPIP untuk secara efektif mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
10. Membawahi administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Administrasi, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di bidang lingkungan hidup.
11. Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan mencapai tujuan yang ditentukan. Menilai pelaksanaan inisiatif dan operasi pemerintah di sektor lingkungan berdasarkan rencana dan aksi program yang telah ditentukan, dengan tujuan kinerja ditingkatkan.
12. Merumuskan laporan di bidang lingkungan hidup berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertariggungjawaban pelaksanaan tugas.
13. Melaksanakan tanggung jawab tugas tambahan yang didelegasikan sejalan dengan peran dan fungsi yang dialokasikan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
14. **Sekretaris:**
15. Menyusun program dan kegiatan administrasi sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran.
16. Mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerinah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
17. Membuat aturan administrasi awal yang selaras dengan program dan kegiatan untuk berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menjalankan tugas dan peran.
18. Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.
19. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik.
20. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan.
21. Meningkatkan pemahaman inovasi kesekretariatan melalui upaya kolaboratif dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
22. Mengkoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas.
23. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja.
24. Mengatur penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
25. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
26. **Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas:**
27. Membuat program dan kegiatan yang berfokus pada struktur, kepatuhan, dan pengembangan kapasitas. Inisiatif ini harus mematuhi pedoman implementasi dan kriteria organisasi. Tujuan dari program dan kegiatan ini adalah untuk menyediakan materi yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun rencana kerja dan kertas anggaran.
28. Membuat rencana awal untuk pembangunan kebijakan di bidang penataan, kepatuhan, dan pengembangan kapasitas. Rencana ini akan berfungsi sebagai panduan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan.
29. Menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan, Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum dan Seksi Peningkatan Kapasitas sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan.
30. Proses verifikasi dokumen, seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Laporan Status Lingkungan Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan, dan Penilaian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), memerlukan pengumpulan dan analisis data dan informasi sumber daya alam. Aturan-aturan ini melayani tujuan perencanaan pembangunan daerah.
31. Mengkaji dokumen lingkungan, khususnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pengendalian Lingkungan Hidup (UKL/UPL), sebagai pedoman praktis untuk mempromosikan kelestarian lingkungan.
32. Melakukan verifikasi keaslian izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) untuk tujuan pengendalian kerusakan lingkungan.
33. Memanfaatkan identifikasi dan analisis masalah untuk menciptakan ide-ide inovatif di bidang organisasi, kepatuhan, dan pengembangan keterampilan. Tujuan dari desain ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja dan meningkatkan standar pelayanan publik.
34. Memastikan pelaksanaan tugas disinkronkan dengan unit kerja lain sesuai dengan standar hukum dan peraturan untuk integrasi tugas.
35. Mengkaji pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Restrukturisasi, Kepatuhan, dan Peningkatan Kapasitas dalam kerangka rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan untuk meningkatkan kinerja.
36. Menghasilkan laporan mengenai pelaksanaan tugas di bidang Restrukturisasi, Kepatuhan, dan Kapasitas. Melaksanakan tugas secara efisien sambil mematuhi struktur akuntabilitas.
37. Melaksanakan tugas resmi tambahan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi.
38. **Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan:**
39. Merumuskan strategi dan inisiatif di bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan Hidup, memastikan mereka mematuhi aturan pelaksanaan dan mandat organisasi, dalam rangka menetapkan rencana kerja dan proposal anggaran.
40. Membuat kebijakan awal di bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan Hidup yang selaras dengan tujuan dan kegiatan, berfungsi sebagai arahan untuk melaksanakan tugas.
41. Seksi Pengelolaan Limbah, Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan akan berkolaborasi dan menyusun strategi untuk memastikan program dan tindakannya sejalan dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan.
42. Menghasilkan laporan awal kegiatan untuk Seksi Pengelolaan Limbah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan, dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Ini akan menjamin bahwa pelaksanaan operasi ini sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
43. Organisasi pengelolaan sampah di tingkat regional melibatkan penetapan tujuan pengurangan sampah dan menentukan prioritas berbagai jenis sampah. Ini juga termasuk menyediakan sarana dan prasarana limbah, serta melakukan penilaian dan pengawasan yang efektif untuk memandu perencanaan dan implementasi pengelolaan limbah.
44. Untuk mengatur pencemaran lingkungan, kami bertujuan untuk memfasilitasi pemantauan dan mitigasi sumber pencemaran baik kelembagaan maupun non-kelembagaan, sesuai dengan persyaratan kualitas lingkungan.
45. Memfasilitasi tata kelola, pemanfaatan yang bertanggung jawab, dan pengendalian degradasi keanekaragaman hayati melalui keterlibatan masyarakat untuk mencegah hilangnya sumber daya genetik dan menjaga ekosistem.
46. Menghasilkan desain inovatif di bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan melalui identifikasi dan analisis isu, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
47. Memastikan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan unit kerja lain yang sejalan dengan program dan rencana kegiatan integrasi tugas.
48. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan Hidup, dengan memperhatikan tujuan program dan tindakan yang telah diidentifikasi untuk meningkatkan kinerja.
49. Menghasilkan laporan tentang efektivitas pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan untuk memastikan tanggung jawab pelaksanaan tugas.
50. Memenuhi tanggung jawab dinas lam yang ditugaskan sesuai arahan pimpinan, menyelaraskan dengan tugas dan fungsi yang mendukung kinerja organisasi.

Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2016 menguraikan tanggung jawab dan peran Unit Kebersihan Dan Persampahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang memberikan rincian tugas dan fungsi UPTD.

1. Struktur Organisasi UPTD Unit Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup:
2. Kepala
3. Kepala Subbagian Tata Usaha
4. Jabatan Pelaksana
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kedudukan Tugas dan fungsi:
7. UKP merupakan unsur pelaksana teknis operasional DLH
8. UKP dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala DLH
9. Melaksanakan kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan dan persampahan,
10. UKP mempunyai fungsi:

* Melaksanakan kebijakan teknis DLH di bidang pengelolaan kebersihan dan persampahan.
* Melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
* Menangani tugas administrasi sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
* Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DLH sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Uraian Tugas UKP
2. **Kepala UKP**

Uraian tugas Kepala UKP sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan pengelolaan kebersihan dan persampahan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan Membuat program dan kegiatan higienis dan pengelolaan limbah dengan memanfaatkan kertas perencanaan, dokumen rencana kerja, dan anggaran.
2. Menerapkan prinsip-prinsip kebersihan dan pembuangan sampah sesuai dengan rencana yang ditentukan untuk menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk menyelesaikan tugas.
3. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi, perencanaan program dan anggaran, serta administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UKP yang komprehensif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, menjamin keberhasilan pelaksanaannya.
4. Melaksanakan inisiatif pengelolaan sampah yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
5. Melaksanakan strategi pengelolaan limbah, yang mencakup pengelolaan limbah rumah, tempat pembuangan sampah, dan tempat pembuangan limbah, sebagaimana ditentukan dalam rencana kerja, dengan tujuan untuk menumbuhkan lingkungan yang murni.
6. Melaksanakan tugas administrasi dan pemeliharaan yang diperlukan untuk sarana dan prasarana di UKP, mengikuti peraturan perundang-undangan, dalam rangka memastikan pelaksanaan kewajiban yang efektif.
7. Meningkatkan pergerakan UKP dengan membuat konten yang memanfaatkan identifikasi dan analisis masalah untuk mengoptimalkan efisiensi kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
8. Mengkaji pelaksanaan tugas UKP sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan dan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja.
9. Menyusun bahan laporan UKP dengan memanfaatkan temuan laporan untuk menyampaikan informasi dan menetapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
10. Melaksanakan tanggung jawab pejabat tambahan yang dialokasikan oleh pimpinan, di samping tugas dan fungsi yang ditunjuk, dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.
11. **Kepala Subbagian Tata Usaha**

Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan UKP dengan memanfaatkan kertas perencanaan untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
2. Memberikan saran Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UKP dengan memanfaatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai kerangka pelaksanaan praktik.
3. Menerapkan UKP sesuai dengan standar perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang terorganisir.
4. Mengumpulkan data pengelolaan UKM untuk mendukung pengembangan kebijakan.
5. Mengelola urusan kepegawaian sesuai dengan undang-undang untuk memastikan administrasi yang terorganisir.
6. Secara efisien mengawasi tugas-tugas administrasi rumah tangga seperti pemeliharaan peralatan, mengatur ruang kantor, memastikan kebersihan kantor, dan menjaga keamanan untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tanggung jawab.
7. Membuat materi inovatif untuk Subbagian Administrasi UKP dengan mengidentifikasi dan menganalisis masalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
8. Mengkaji pelaksanaan tanggung jawab Subbagian Administrasi UKP berdasarkan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dengan tujuan meningkatkan kinerja.
9. Menyusun bahan laporan Subbagian Administrasi UKP, menggunakan temuan laporan untuk memberikan informasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tanggung jawab.
10. Memenuhi tugas resmi tambahan yang diberikan oleh pimpinan, sejalan dengan tanggung jawab dan fungsi yang diberikan, untuk meningkatkan kinerja organisasi.

**IV.2.2 Sumber Daya Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang**

1. **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Kehadiran Sumber Daya Manusia (SDM) dengan latar belakang akademis dan jenjang pendidikan formal yang beragam sangat krusial untuk efektivitas menjalankan tanggung jawab pokok dan kegiatan DLH Kabupaten Pemalang. Tabel di bawah ini memberikan deskripsi profil SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, dikategorikan berdasarkan status pekerjaan;

**Tabel 4. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **STATUS** | **JUMLAH** |
| 1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 170 |
| 2 | Tenaga Non PNS | 245 |
|  | **Total** | **415** |

Sumber: website DLH Kabupaten Pemalang - https://dlh.pemalangkab.go.id

Total ada 14 pegawai yang memegang peran struktural sesuai dengan ketentuan (“Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2016,”) tentang Pembentukan dan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Distribusi staf di berbagai bidang, sesuai struktur organisasi, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KETERANGAN** | **JUMLAH**  **(Orang)** | % |
| **1** | Kepala Dinas | 1 | 0,24 |
| **2** | Sekretariat | 20 | 4,82 |
| **3** | Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas | 17 | 4,10 |
| **4** | Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan | 17 | 4,10 |
| **5** | UPTD Unit Kebersihan & Persampahan | 364 | 86,75 |
| **Jumlah** | | 415 | 100 |

Sumber: website DLH Kabupaten Pemalang - https://dlh.pemalangkab.go.id

Mayoritas karyawan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang diklasifikasikan sebagai kelas III, terdiri dari 12 individu, yang merupakan 64% dari total tenaga kerja.

Tabel berikut memberikan rincian jumlah karyawan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, dikategorikan menurut kelompok yang ditampilkan di bawah ini:

**Tabel 4. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **STATUS KEPEGAWAIAN** | **GOL/RUANG** | **JUMLAH**  **(Orang)** | % |
| **1** | Pembina Tingkat I | IV/b | 1 | 0,59 |
| **2** | Pembina | IV/a | 3 | 1,76 |
| **3** | Penata Tingkat I | III/d | 5 | 2,94 |
| **4** | Penata | III/c | 1 | 0,59 |
| **5** | Penata Muda Tk I | III/b | 8 | 4,71 |
| **6** | Penata Muda | III/a | 6 | 3,53 |
| **7** | Pengatur  Tk. I | II/d | 24 | 14,12 |
| **8** | Pengatur | II/c | 3 | 1,76 |
| **9** | Pengatur  Muda Tk. I | II/b | 43 | 25,29 |
| **10** | Pengatur  Muda | II/a | 3 | 1,76 |
| **11** | Juru Tingkat I | I/d | 71 | 41,76 |
| **12** | Juru | I/c | 2 | 1,18 |
| **13** | Juru Muda Tingkat I | I/b |  |  |
| **Jumlah** | | | 170 | 100 |

Sumber: website DLH Kabupaten Pemalang - https://dlh.pemalangkab.go.id

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang mempekerjakan individu dengan berbagai jenjang pendidikan. Staf di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang beragam, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. 4 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TINGKAT PENDIDIKAN** | **JUMLAH** **(Orang)** | **%** |
| **PNS** | | | |
| **1** | Doktoral (S3) | 1 | 0,59 |
| **2** | Strata 2 (S2) | 5 | 2,94 |
| **3** | Strata 1 (S1) | 15 | 8,82 |
| **4** | Diploma III (D3) | 3 | 1,76 |
| **5** | Diploma II (D2) |  |  |
| **6** | Diploma I (D1) |  |  |
| **7** | SMA/Sederajat | 39 | 22,94 |
| **8** | SMP/Sederajat | 46 | 26,47 |
| **9** | SD | 62 | 5 |
| **PTT/HONORER** | | | |
| **1** | Strata 2 (S2) | – | 21 |
| **2** | Strata 1 (S1) | 2 | 32 |
| **3** | Diploma III (D3) | 0 | 16 |
| **4** | Diploma II (D2) | 0 |  |
| **5** | Diploma I (D1) | 0 |  |
| **6** | SMA/Sederajat | 100 | 21 |
| **7** | SMP/Sederajat | 8 | 5 |
| **8** | SD | 40 | 5 |
| **Jumlah** | | 148 | 100 |

Sumber: website DLH Kabupaten Pemalang - https://dlh.pemalangkab.go.id

Sumber daya manusia yang ada dengan latar belakang pendidikan tersebut sangat menguntungkan bagi dinas untuk secara efektif menangani masalah lingkungan di wilayah Kabupaten Pemalang.

1. **Sarana dan Prasarana**

Selain mengandalkan sumber daya tenaga kerja manusia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang memiliki dukungan sarana dan prasarana yang tersebar di seluruh Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kantor UPT Kebersihan dan Persampahan (UKP) untuk membantu menjalankan operasi kelembagaan. Sumber daya ini sangat penting untuk memfasilitasi kelancaran fungsi lembaga. Sarana dan prasarana merupakan elemen penting yang memudahkan pelaksanaan tugas operasional. Fasilitas mencakup semua sumber daya yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan, sementara infrastruktur mengacu pada sistem pendukung utama untuk suatu kegiatan. Fasilitas dapat dicirikan sebagai peralatan atau benda portabel, seperti komputer, mesin, alat tulis, atau mobil, sedangkan infrastruktur mengacu pada benda atau struktur tetap, seperti bangunan, ruangan, atau tanah.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang disajikan daam tabel berikut:

**Tabel 4. 5 Sarana dan Prasarana**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **KELOMPOK JENIS BARANG** | **VOLUME** |
| **1** | Gedung dan Bangunan |  |
|  | * Gedung Kantor | 3 unit |
|  | * TPA | 1 unit |
|  | * TPS | 131 unit |
|  | * TPST | 6 unit |
|  | * Depo Transfer | 7 unit |
| **2** | Kendaraan operasional |  |
|  | * Truck tangki | 1 unit |
|  | * Dump truck | 32 unit |
|  | * Truck amroll | 5 unit |
|  | * Buldozer | 2 unit |
|  | * Excavator | 2 unit |
|  | * Pick up | 4 unit |
|  | * Mobil laboratorium | 1 unit |
|  | * Gerobak sampah | 1 unit |
|  | * Becak sampah | 46 unit |
|  | * Kontainer | 18 unit |
|  | * Bus toilet vip | 1 unit |

Sumber: DLH Kabupaten Pemalang - https://dlh.pemalangkab.go.id

Sarana dan prasarana yang ada dalam hal ini memang cukup memadai, namun pemrosesan akhir di TPA belum secara maksimal. Seperti kondisi TPA yang sudah melebihi kapasitas akibat terdapat gunungan sampah yang tinggi daari pembuangan terbuka *(open dumping).* Maka dari itu perlu penyusunan strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang agar terbentuk strategi kebijakan dalam pemrosesan akhir di TPA.